

Implementasi Program SIAP QRIS Pada Sektor UMKM Kuliner di Pasar Raya Kota Padang

Restia Rahma Dilla Putri¹, Nora Eka Putri²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program SIAP QRIS pada sektor UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelaku UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang yang belum menyediakan QRIS dalam transaksi jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan *quasi qualitative* dengan menggunakan metode penelitian *simple reserarch desain* (SRD). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIAP QRIS pada sektor UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang menggunakan teori implementasi program David C. Korten telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tercermin dari pencapaian sebagian besar tujuan program SIAP QRIS, yang terlihat dari peningkatan volume transaksi QRIS sejak implementasi pasar SIAP QRIS di Pasar Raya Kota Padang. Selain itu, organisasi pelaksana yaitu Dinas Perdagangan Kota Padang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dan Perbankan telah menunjukkan pemahaman, pengetahuan dan kontribusi yang cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Oleh karena itu, masih ditemukan kendala dalam implementasi program SIAP QRIS pada sektor UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang, terutama dalam hal pemahaman dalam penggunaan QRIS, belum meratanya sosialisasi dari organisasi pelaksana, infrastruktur digital yang kurang memadai, serta adanya kesalahan teknik dalam pengalihan dana pada *multiple* QRIS.

Kata kunci : Implementasi Program, Program SIAP QRIS, Pasar Raya Kota Padang

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.125>

*Correspondence: Restia Rahma Dilla Putri

Email: restiarahmadillaputri@gmail.com

Received: 06-06-2024

Accepted: 11-07-2024

Published: 02-08-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to describe how the SIAP QRIS Program is implemented in the culinary MSME sector at Pasar Raya Padang City. This research is motivated by the fact that there are still many culinary MSMEs in Pasar Raya Padang City who do not yet provide QRIS for buying and selling transactions. This research uses a quasi qualitative approach using the simple research design (SRD) research method. The data collection techniques used by researchers were interview, observation and documentation methods. The research results show that the implementation of the SIAP QRIS program in the culinary MSME sector in Pasar Raya Padang City using David C. Korten's program implementation theory has gone quite well, although not completely successful. This is reflected in the achievement of most of the SIAP QRIS program objectives, which can be seen from the increase in QRIS transaction volume since the implementation of the SIAP QRIS market at Pasar Raya Padang City. Apart from that, the implementing organizations, namely the Padang City Trade Service, the Padang City Cooperative and MSME Service, and Banking have shown quite good understanding, knowledge and contribution, although implementation has not been optimal. Therefore, obstacles are still found in implementing the SIAP QRIS program in the culinary MSME sector in Pasar Raya Padang City, especially in terms of understanding the use of QRIS, uneven socialization from implementing organizations, inadequate digital infrastructure, and technical errors in diverting funds. on multiple QRIS

Keywords: Program Implementation, SIAP QRIS Program, Pasar Raya Padang City

Pendahuluan

Ekonomi digital adalah sektor ekonomi yang didasarkan pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berbasis digital (Aprilia et al., 2021). Di era digitalisasi saat ini, pengimplementasian kemajuan teknologi informasi dalam upaya membantu pertumbuhan ekonomi digital adalah dengan adanya transformasi digital pada sistem pembayaran, sehingga semua sektor usaha dituntut harus siap beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan dalam sistem pembayaran digital. Salah satu sektor usaha yang harus mampu bertransformasi dalam sistem pembayaran digital adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memegang peranan penting dan krusial dalam perekonomian di Indonesia (Sarfiah et al., 2019).

Sektor UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana sektor UMKM ikut memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 %. Selain itu, UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja yang ada sebanyak 97% serta dapat mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024). Sesuai dengan visi pemerintah, UMKM yang berperan sebagai roda perekonomian utama di Indonesia diminta untuk selalu siap dalam menghadapi multi kultural, multi mata uang, dan inovasi teknologi baru dalam bertransaksi (Rafferty & Fajar dalam (Rifani, 2023)). Dalam hal ini, pelaku UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dalam perkembangan bisnis berbasis digital dengan menggunakan internet untuk operasional bisnis, seperti *Financial Technology (Fintech)* yang merupakan pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran.

Bank Indonesia berupaya mendukung transformasi dalam sistem pembayaran, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan mulai dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang bertujuan untuk mengajak semua lapisan masyarakat dalam mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) dalam sistem pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pembayaran digital, Bank Indonesia meluncurkan standarisasi sistem pembayaran QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Dalam mendukung perkembangan penggunaan QRIS, Bank Indonesia dan Kementerian perdagangan Republik Indonesia menginisiasi sebuah program sebagai upaya tranformasi ekonomi digital di Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan yaitu Program SIAP QRIS yang merupakan program penancangan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan yang S.I.A.P (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) QRIS. Di Kota Padang, adapun salah satu pasar rakyat yang telah diresmikan sebagai Pasar SIAP QRIS oleh Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat adalah Pasar Raya Kota Padang dengan kelompok sasarannya yaitu pelaku

usaha atau UMKM yang ada di Pasar Raya tersebut (Bank Indonesia KPw Sumatera Barat, 2024).

Diantara banyaknya UMKM yang ada, salah satu UMKM yang mendominasi pasar adalah UMKM di bidang kuliner dengan jenis usaha paling banyak digandrungi dari berbagai kalangan yang dituntut untuk mampu beradaptasi dengan merubah pola aktivitas pasar baik dari segi pemasaran digital (*digital marketing*) maupun dari segi pembayaran yang berbasis digital. Program SIAP QRIS hadir sebagai jawaban bagi pelaku UMKM Kuliner di Pasar rakyat dalam mendorong upaya digitalisasi pada sistem pembayaran yaitu dengan menerapkan pembayaran nontunai melalui QRIS. Hal ini dapat menjadi batu loncatan bagi UMKM Kuliner untuk membranding usahanya dalam mengikuti arus tren pembayaran tanpa uang tunai.

Meskipun implementasi mengenai program SIAP QRIS pada sektor UMKM Kuliner di Pasar Raya Kota Padang ini telah dilaksanakan, namun masih belum semua pelaku UMKM kuliner yang menyediakan pembayaran melalui QRIS di Pasar Raya Kota Padang. Dalam implementasi program SIAP QRIS, ditemukan berbagai permasalahan yang bersumber dari dua elemen yaitu dari pelaku UMKM (*merchant*) dan konsumen (Sartini et al., 2023). Permasalahan QRIS ini dikarenakan keterbatasan yang ada yaitu rendahnya kemampuan serta pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi, disini UMKM dituntut harus peka terhadap perkembangan teknologi demi mendukung perkembangan usahanya di era digitalisasi saat ini (Hutagalung et al., 2021).

Selain itu, adanya kebijakan penetapan tarif yang dibebankan kepada pedagang (*merchant*) dari transaksi QRIS yang sebelumnya gratis. Biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* ini menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha di Pasar Rakyat (Ihsan & Siregar, 2024). Tidak hanya itu, pelaksanaan QRIS hanya bersumber pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, diperlukan peraturan tambahan untuk mengatur masalah inovasi ekonomi digital yang mencakup hingga sektor terkecil sekalipun, sehingga UMKM dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi digital Indonesia (Tobing et al., 2021). Dalam konteks permasalahan yang telah dipaparkan, penulis ingin melakukan penyelidikan secara mendalam terkait bagaimana implementasi Program SIAP QRIS pada sektor UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *quasi- qualitative* atau desain kualitatif semu, dengan metode penelitian *simple reserarch desain (SRD)*, (Bungin, 2020) menjelaskan bahwa dalam metode ini terdapat 5 langkah penelitian yaitu :

- a. *Social context and research question*, pada tahap ini peneliti akan menentukan konteks sosial yang digunakan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan penelitian yang relevan dengan konteks sosial tersebut
- b. *Literatur review*, pada tahap ini peneliti melakukan review terhadap literatur yang relevan dengan konteks sosial dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan
- c. *Research methods and data collection*, pada tahap ini peneliti mempelajari metode penelitian yang akan digunakan, lalu menerapkannya pada data yang telah ditemukan di lapangan
- d. *Data analysis*, pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah didapat di lapangan, kemudian menggunakan teori untuk melakukan analisis hasil penelitian tersebut
- e. *Reporting*, tahapan akhir ini melibatkan pelaporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan *purposive sampling* yang merupakan teknik pemilihan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti tentang siapa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel sesuai dengan karakteristik atau ciri tertentu (Fauzy, 2019). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Bank Nagari Cabang Pasar Raya Kota Padang serta pelaku UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang. Dalam memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber. Sementara itu, untuk analisis data meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut (Pramono, 2020) implementasi adalah salah satu tahapan dalam konteks kebijakan publik, tahap ini biasanya dilakukan ketika kebijakan telah dirumuskan dengan tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Pelaksanaan kebijakan publik adalah kegiatan yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan berdasarkan kebijakan yang disahkan (Desrinelti et al., 2021). Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, program SIAP QRIS merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.

Di Provinsi Sumatera Barat, adapun pasar rakyat dan pusat perbelanjaan yang telah diresmikan sebagai Pasar SIAP QRIS oleh Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Sumatera Barat yang telah launching program SIAP QRIS

No.	Nama Pasar dan Pusat Perbelanjaan SIAP QRIS
	Pasar Rakyat
1	Pasar Kuliner Padang Panjang
2	Pasar Raya Kota Padang
3	Pasar Lubuk Buaya Kota Padang
4	Pasar Siteba Kota Padang
5	Pasar Serikat C Batusangkar
6	Pasar Aur Kuning Bukittinggi
7	Pasar Atas Bukittinggi
8	Pasar Bawah Bukittinggi
9	Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman
	Pusat Perbelanjaan
1	Basko Grand Mall
2	Transmart

Sumber : Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dalam Implementasi Program SIAP QRIS pada sektor UMKM Kuliner di Pasar Raya Kota Padang sudah terimplementasikan dengan cukup baik, hal ini disesuaikan dengan teori implementasi program David C. Korten (1998: 11) bahwa implementasi program dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu:

a. Program

Menurut Korten dalam (Bahri et al., 2020), program berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian terhadap apa yang disediakan oleh program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kesesuaian ini memiliki pengaruh yang besar karena akan langsung memengaruhi manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran. Jika program tidak sesuai dengan yang dibutuhkan kelompok sasaran, maka hasilnya tidak akan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Menurut (Manila,1996), indikator suatu program yang baik mencakup beberapa aspek berikut:

1) Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas

Dalam memenuhi aspek kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran, perlu ditetapkan tujuan untuk membantu pembuat program dan organisasi

pelaksana melaksanakan tugas dengan terstruktur dan mencapai target yang diharapkan. Untuk mencapai program yang efektif, perlu dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap sejauh mana program tersebut mencapai tujuan awalnya (Sartini et al., 2023). Biasanya, setiap tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah tercantum dan dijelaskan dalam regulasi yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, dimana tujuan program SIAP QRIS ini telah tergambar pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 / PADG /2019. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang penulis lakukan, tujuan yang ingin dicapai dari implementasi program SIAP QRIS di Pasar Rakyat yaitu untuk mendorong digitalisasi pada sektor UMKM sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, program SIAP QRIS ini bertujuan untuk memfasilitasi transaksi nirsentuh bagi masyarakat dan pedagang di pasar rakyat. Secara khusus, tujuan utama implementasi program SIAP QRIS di Kawasan Pasar Raya Kota Padang ini adalah karena Pasar Raya Kota Padang merupakan salah satu pasar rakyat terbesar dan terlengkap di Kota Padang sehingga banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli di pasar ini (Bank Indonesia Kpw Provinsi Sumatera Barat, 2024). Tujuan program SIAP QRIS sebagian besar telah tercapai yang dapat dilihat dari kenaikan jumlah volume transaksi QRIS sejak implementasi Pasar SIAP QRIS pada tahun 2022. Namun, berdasarkan temuan penulis di lapangan, masih ada pelaku UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang yang belum menyediakan pembayaran melalui QRIS, sehingga tujuan ini belum sepenuhnya tercapai di Pasar Raya Kota Padang.

- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
Implementasi program menciptakan hubungan antara tujuan program dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan program. Bank Indonesia memiliki berbagai kebijakan untuk mendukung implementasi program SIAP QRIS, salah satunya melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Berdasarkan hasil temuan dari wawancara yang penulis lakukan terungkap bahwa, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam mendukung Program SIAP QRIS untuk meningkatkan adopsi pembayaran digital di pasar tradisional, dimana segala keputusan, aturan, dan inisiatif mengenai implementasi QRIS berasal dari Bank Indonesia pusat dan diteruskan ke seluruh kantor wilayah untuk diimplementasikan. Adapun kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam

mencapai tujuan program SIAP QRIS tersebut, salah satunya dalam masalah kebijakan tarif yang dibebankan kepada pedagang. Bank Indonesia mengambil kembali kebijakan terbaru dengan memutuskan untuk menyesuaikan *merchant discount rate (MDR)* atau tarif QRIS bagi usaha mikro. Tarif QRIS kini diterapkan secara progresif berdasarkan nominal per transaksi, dimana tarif QRIS menjadi 0 persen atau gratis untuk transaksi hingga Rp 100.000, sedangkan tarif 0,3 % dikenakan untuk transaksi di atas Rp 100.000 (Bank Indonesia, 2023).

Sedangkan organisasi pelaksana menjalankan program SIAP QRIS ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dalam hal ini salah satu kebijakan dalam mendukung program SIAP QRIS di Pasar Raya Kota Padang yaitu adanya Peraturan Walikota Kota Padang tentang pemungutan retribusi pasar secara elektronik yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

3) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan

Program biasanya memiliki alokasi anggaran sendiri, dan sering kali diidentifikasi melalui penganggaran yang khusus untuk mendukung pelaksanaannya. Berdasarkan temuan penelitian, program SIAP QRIS memiliki anggaran dari berbagai sumber, baik itu bersumber dari anggaran Bank Indonesia ataupun organisasi pelaksana, hal ini tergantung pada pihak penyelenggara kegiatan dalam mensukseskan program tersebut. Adapun biaya operasional yang dikeluarkan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada pelaksanaan program SIAP QRIS di Pasar Raya Kota Padang ini berkisar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pencetakan materi branding pasar tersebut (Bank Indonesia Kpw Provinsi Sumatera Barat, 2024).

4) Adanya strategi dalam pelaksanaan

Strategi diperlukan dalam pelaksanaan program, penggunaan strategi digitalisasi bagi pelaku UMKM di sektor kuliner bertujuan untuk meningkatkan daya tahan bisnis mereka dalam menjalankan usaha (Irawan & Ghonisyah, 2023). Berdasarkan hasil temuan penelitian, terungkap bahwa Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah merancang strategi yang matang untuk mendukung implementasi program SIAP QRIS bagi UMKM Kuliner di Pasar Raya yang mencakup pendekatan edukasi dan sosialisasi, sedangkan organisasi pelaksana melakukan pelatihan dan pendampingan serta berpartisipasi aktif dalam berbagai event yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital ini. Namun, sosialisasi ini belum sepenuhnya

efektif tersampaikan kepada pelaku UMKM kuliner dan masyarakat sehingga masih banyak pelaku UMKM Kuliner dan masyarakat sebagai target kebijakan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman program SIAP QRIS di Pasar Raya Kota Padang tersebut.

b. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten dalam (Bahri et al., 2020), kesesuaian program dengan organisasi pelaksana sangat penting. Jika organisasi pelaksana program tidak mempunyai kapasitas untuk menjalankan tugas yang diminta oleh program, maka mereka tidak akan dapat melaksanakan program dengan efektif. Ini dapat mengakibatkan program tidak mencapai manfaat yang diharapkan, yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian tujuan program. Dilihat dari aspek kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, implementasi program SIAP QRIS pada sektor UMKM Kuliner di Pasar Raya Kota Padang sudah terealisasi dengan baik. Organisasi pelaksana yang dimaksud dalam program SIAP QRIS di Pasar Raya Kota Padang ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, serta Perbankan.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, ada tiga hal yang dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan:

1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)

Dalam implementasi suatu program, penting untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai. Tidak semua orang memahami atau memiliki pengetahuan mengenai sistem pembayaran non-tunai. (Haholongan et al., 2024). Pemahaman dan pengetahuan organisasi pelaksana tentang QRIS sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan optimal dalam mendukung digitalisasi sektor UMKM. Berdasarkan temuan penelitian terungkap bahwa organisasi pelaksana program SIAP QRIS telah memahami secara menyeluruh mengenai berbagai aspek program, termasuk tujuan program, tanggung jawab, dan tugas sebagai pelaksana program, hal ini didukung dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat terhadap organisasi pelaksana sebelum program SIAP QRIS dilaksanakan. Dari koordinasi tersebut disepakati Pasar Raya Kota Padang dipilih sebagai proyek percontohan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan program SIAP QRIS, yang telah memenuhi kriteria program yaitu 50% dari pedagang sudah memiliki kanal pembayaran melalui QRIS (Bank Indonesia Kpw Sumatera Barat, 2024).

2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, arah respon pelaksana dalam implementasi Program SIAP QRIS pada sektor UMKM Kuliner di Pasar Raya Kota Padang adalah menerima, hal ini terlihat dari komitmen mereka dalam mengadopsi dan mengintegrasikan sistem pembayaran QRIS di Pasar Raya Kota Padang mulai sejak program ini launching di Pasar Raya Kota Padang. Alasan organisasi pelaksana menerima program SIAP QRIS untuk di implementasikan di Pasar Raya Kota Padang ini karena ingin mendorong digitalisasi pada sektor UMKM melalui transformasi pembayaran digital di Pasar Raya Kota Padang. Perkembangan teknologi yang cepat dalam era transformasi digital menekan masyarakat untuk beradaptasi dengan penggunaan dan penyatuan teknologi dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam aktivitas bisnis (Farhan & Shifa, 2023).

3) Intensitas dari respon pelaksana

Intensitas dan respon pelaksana sangat penting dalam melaksanakan suatu program, hal ini tercermin dari keterlibatan dan dedikasi organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan QRIS di Pasar Raya Kota Padang. Mereka tidak hanya menerima program ini, tetapi juga berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai acara yang mendukung keberhasilan program SIAP QRIS. Acara-acara tersebut melibatkan pelaku UMKM kuliner untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital, sehingga memastikan implementasi QRIS selaras di pasar-pasar rakyat. Selain itu, organisasi pelaksana juga melakukan monitoring setelah program tersebut diresmikan, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan dan komitmen dalam menjalankan program tersebut, meskipun belum maksimal karena sosialisasi ataupun pelatihan yang diberikan tidak dapat menjangkau semua pelaku UMKM kuliner di Pasar Raya Kota Padang. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pernyataan (Aryuniasari et al., 2023) bahwa masih kurangnya dukungan dari pemerintah sehingga sulit untuk mendesak UMKM agar siap mengadopsi teknologi informasi.

c. Kelompok sasaran

Pada elemen ini, Korten menyoroti pentingnya fokus pada kelompok sasaran program. Hal ini menekankan perlunya kesesuaian antara target program dengan pencapaian yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana, agar tujuan dari program

tersebut dapat memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Secara dasar, ada lima kriteria yang perlu dipenuhi untuk implementasi yang efektif (Nugroho, 2023), yaitu:

1) Tepat kebijakan atau program

Keberhasilan suatu kebijakan diukur berdasarkan sejauh mana program yang ada mampu mengatasi masalah yang ingin diselesaikan. Selain itu, program tersebut harus dirancang sesuai dengan sifat masalah tersebut. Terakhir, program harus dikembangkan oleh lembaga atau badan berwewenang sesuai dengan karakteristik program tersebut (Nugroho, 2023). Berdasarkan temuan dalam penelitian yang penulis lakukan, program SIAP QRIS dinilai tepat sebagai solusi berkelanjutan dalam mempercepat adopsi pembayaran digital di sektor-sektor terkecil di pasar rakyat, yang minim teknologi modern dalam pembayaran. Program ini bisa mengajak pelaku UMKM untuk mengadopsi QRIS dalam sistem pembayaran guna mengurangi penggunaan uang tunai dan meningkatkan digitalisasi UMKM. Selain itu, program SIAP QRIS dirancang sesuai dengan karakteristik pasar rakyat dan UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi modern untuk pembayaran. Terakhir, program SIAP QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter yang berwewenang mengatur sistem pembayaran di Indonesia.

2) Tepat pelaksanaannya

Menurut (Nugroho, 2023), aktor implementasi kebijakan atau program tidaklah hanya pemerintah. Ini berarti aktor implementasi harus sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Dalam penerapan program SIAP QRIS pada sektor UMK kuliner di Pasar Raya Kota Padang ini, aktor yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya adalah aktor-aktor yang terlibat dalam program tersebut yaitu Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Perbankan khususnya Bank yang menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang sudah memiliki fitur QRIS (Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2024).

3) Tepat target

Ketepatan target berkaitan dengan sasaran yang dituju, sesuai dengan rencana yang telah disusun dan target tersebut harus siap untuk diintervensi dan mendukung pelaksanaan program yang direncanakan (Nugroho, 2023). Dalam Program SIAP QRIS di Pasar Raya Kota Padang ini, target atau sasaran program yang disasar oleh Bank Indonesia dan organisasi pelaksana adalah semua pelaku UMKM atau pelaku usaha yang ada di Pasar tersebut. Pelaku UMKM khususnya pada sektor kuliner di Pasar Raya Kota Padang merupakan sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan

dari program SIAP QRIS yang diimplementasikan di Pasar Raya Kota Padang. Target mendukung pelaksanaan program dengan berpartisipasi aktif dalam serangkaian kegiatan dalam program SIAP QRIS di Pasar Raya Kota tersebut.

4) Tepat proses

Tepat proses ini artinya organisasi pelaksana dan masyarakat saling sepakat untuk memahami dan melaksanakan aturan main, di mana lembaga pelaksana bertanggung jawab menerima dan memahami serta menjalankan program sebagai bagian dari tugasnya, sedangkan masyarakat juga harus dapat menerima dan memahami, serta menjalankan program tersebut sebagai kelompok sasaran (Nugroho, 2023). Dalam proses implementasi program SIAP QRIS masyarakat sebagai pengunjung pasar turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program SIAP QRIS yaitu dengan dengan mengadopsi dan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran yang diterima di pasar, sehingga mendukung keberlangsungan dan keberhasilan program tersebut. Namun, mayoritas pengunjung pasar yang mengadopsi QRIS itu biasanya yang aktif dalam menggunakan teknologi digital seperti pegawai pemerintah atau swasta dan juga dari kalangan usia yang relatif muda atau masyarakat. Hal ini dikarenakan mayoritas generasi muda lebih menyukai metode pembayaran digital daripada menggunakan uang tunai (Alifia, 2024).

Kesimpulan

Implementasi Program SIAP QRIS pada sektor UMKM Kuliner di Pasar Raya Kota Padang telah berjalan dengan cukup baik meskipun belum maksimal, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh David C. Korten (1988), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh tiga elemen yaitu: elemen program, elemen organisasi pelaksana, dan elemen kelompok sasaran. Dalam elemen program, ada kesesuaian antara program SIAP QRIS dan kebutuhan UMKM kuliner, yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi pada UMKM sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, hal ini juga didukung oleh kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi ini, dengan alokasi anggaran yang memadai dan strategi pelaksanaan yang matang. Elemen Organisasi pelaksana, termasuk Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM, serta Perbankan menunjukkan komitmen tinggi dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, dan monitoring berkelanjutan, meskipun belum maksimal karena tidak dapat menjangkau semua pelaku UMKM di Pasar tersebut. Namun, respons positif dan dedikasi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima program ini, tetapi juga berupaya aktif untuk keberhasilannya. Elemen kelompok sasaran, yaitu pelaku UMKM kuliner, sebagian besar

telah mengadopsi QRIS. Namun, masih ada beberapa pelaku UMKM kuliner yang kurang memahami penggunaannya. Hal ini menggambarkan bahwa program SIAP QRIS sebagian besar telah tercapai, meski belum sepenuhnya dapat menjangkau semua kalangan pelaku UMKM kuliner di Pasar raya Kota Padang.

Daftar Pustaka

- Alifia, N adhifa. (2024). Analisis Penggunaan QRIS Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 9(1).
- Aprilia, N. D., Waluyo, S. D., & Saragih, H. J. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia The Development of Indonesia'S Digital Economy. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7 (2).
- Aryuniasari, Rakib, M., & Ihsan Said, M. (2023). Analisis Pengembangan UMKM Melalui *Digital Entrepreneurship* Dengan Model Triplehelix Pada Pasar Hanggar Talasalapang di Kota Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(1). <https://journal.unm.ac.id/index.php/JE3S/index>
- Bahri, S., Bedjo Sujanto, Mp., & Madhakomala, Mp. R. (2020). *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. www.penerbitwidina.com
- Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat
- Bungin, B. (2022). *Post-Qualitative Social Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. Kencana.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Farhan, ahmad, & Shifa, A. W. (2023). Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap Pada Setiap UMKM di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(2).
- Fauzy, A. (2019). *Metode Sampling* (A. Canty, Ed.; 2nd ed.). Universitas Terbuka

- Haholongan, R., Kananto, R., Fazreen, S., Rahma Putri, D., Dea Hapsari, A., & Septiana, N. (2024). Penyuluhan Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Kepada Pelaku Usaha Ikan Hias Jatinegara. *Communnity Development Journal*, 5(2), 3223–3227.
- Hutagalung, R. A., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2021). Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 94–103. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.260>
- Ihsan, N., & Siregar, S. (2024). Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Respond Indonesia Standard (Qris) Di Pasar Bhakti Kisaran. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 704–717. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i2.4279>
- Irawan, I. A., & Ghonisyah, G. A. A. (2023). Strategi Digitalisasi Pada UMKM di Bidang Kuliner pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 19(1). <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>
- Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Terms Of Reference (Tor) Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis*.
- Manila, I.GK, 2006. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nugroho, Riant. (2023) *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Politik*. (7 th ed). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.; 1st ed.). UNISRI Press.

- Rifani, R. A. (2023). Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare. *AMSIR Accounting & Finance Journal*, 1(1), 16–23. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang_media/news_release/Pages/SP_216219.aspx.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sartini, P., Dharmanu Yudharta, P., & Purnamaningsih, E. (2023). *Efektivitas Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Mendukung Inklusi Keuangan Digital di Pasar Badung, Kota Denpasar* (Vol. 1, Issue 3). Online. <https://lgdpublishing.org/index.php/birev>
- Tobing, G. J., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Acta Comitatus*, 6(03), 491. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p3>